

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia Kebutuhan Perkembangan ekonomi semakin berkembang hal ini didukung oleh makin meningkatnya jumlah pengguna internet dan smartphone di Indonesia. Kebutuhan masyarakat ini mendorong para pelaku jasa keuangan untuk terus melakukan inovasi dan transformasi dari transaksi secara tradisional ke dalam bentuk digital hal ini dilakukan agar lebih singkat, mudah, dan terjangkau. Dengan penggunaan teknologi informasi dan inovasi di sektor jasa keuangan di Indonesia, maka saat ini dapat dilihat perkembangan yang cukup signifikan. Beragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang sering disebut sebagai Financial Technology (Fintech), hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti perubahan perilaku, perekonomian Indonesia, kondisi geografis, latar belakang budaya, faktor demografis, serta tingkat literasi dan edukasi masyarakat tentang produk dan jasa keuangan.¹

Akses masyarakat pada keuangan, terutama pada layanan perbankan di Indonesia sudah lama menjadi isu penting yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Menurut survei Bank Dunia, yang dilansir Bisnis Indonesia pada Mei 2017 baru 37% penduduk dewasa Indonesia memiliki rekening bank. Sementara sebesar 27% penduduk dewasa Indonesia memiliki simpanan formal dan 13% memiliki pinjaman formal. Artinya, sebanyak 63%

¹ Sarwin Kiko N, dkk, *Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, <https://konsumen.ojk.go.id>, akses tgl 10 November 2018.

warga Indonesia belum dapat menikmati fasilitas keuangan termasuk perbankan. Melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pemerintah pun menargetkan peningkatan rasio masyarakat pengakses layanan bank menjadi 79% pada 2019.²

Kehadiran fisik perbankan yang masih relatif rendah ini pada akhirnya mempengaruhi pula tingkat akses masyarakat terhadap beragam jenis layanan perbankan, termasuk layanan pinjaman. Ketatnya perbankan dalam menyeleksi peminjam, ditambah tingkat kemelekan finansial (financial literacy) masyarakat Indonesia yang masih rendah, menjadikan layanan pinjaman yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia belum sepenuhnya mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Berangkat dari hal tersebut muncul berbagai inovasi-inovasi. Dalam mengatasi masalah-masalah keuangan salah satu yang paling menarik perhatian adalah kehadiran fintech (Financial Teknologi) salah satunya hadirnya Layanan pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau disebut *peer to peer lending*.³

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau bisa disebut *peer to peer lending* merupakan layanan *fintech* yang mempertemukan pemberi pinjaman (calon kreditur) dengan peminjam (calon debitur) secara *online* tanpa harus saling bertatap muka. Selain itu, memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan konvensional (bank) sebagai

² Awan, *Hambatan Akses Fintech*, <https://www.awantunai.com>, akses tgl 11 November 2018

³ Ibid.

perantara. Pada dasarnya, sistem *P2PL* ini sangat mirip dengan konsep *marketplace online*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Jadi, boleh dikatakan bahwa *P2PL* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam meminjam uang. Menjamurnya penyedia layanan pinjam meminjam berbasis teknologi (*fintech*) menawarkan alternatif baru, memberikan dengan proses mudah dan waktu yang cepat.⁴

Disamping kelebihan yang ditawarkan oleh perusahaan fintech diatas (p2p lending) ada berbagai risiko yang mungkin muncul baik dari Peminjam maupun pemberi Pinjaman, berdasarkan laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sejak Januari sampai Maret pada tahun 2018 ini pihak YLKI sendiri telah menerima lebih dari 50 Pengaduan dari Pinjaman Online bahkan hal ini terus bertambah, kebanyakan dari keluhan yang disampaikan adalah mulai dari cara penagihan hingga dari sistem perhitungan bunga dan denda yang tidak jelas, provisi (biaya administrasi), yang tidak ditentukan di awal, Bentuk penagihan yang sering dilakukan adalah dengan cara mengancam hingga menagih lewat orang yang nomor handponnya ada di daftar kontak di seluler milik konsumen. Banyak konsumen mengeluhkan mendapatkan kompensasi dengan bunga pinjaman yang tinggi. Ada beberapa perusahaan fintech sendiri tidak menentukan terkait batasan bunga serta ketidakjelasan terkait denda oleh perusahaan fintech sehingga banyak masyarakat diurugikan akan hal tersebut dan peminjam harus mengembalikan dana yang dipinjam dalam jumlah yang besar sehingga bunga ini akan membuat potensi terhadap

⁴ Alfica Reszita S, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Tecnolgi berbasis P2P*, <https://dspace.uui.ac.id>, akses 11 November 2018.

resiko gagal bayar selain itu Dengan adanya informasi konsumen dalam database perusahaan Fintech, maka terdapat potensi risiko terkait privasi data konsumen maupun data transaksi yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.⁵

Sementara itu berdasarkan laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta hingga Agustus 2019 telah menerima 1330 laporan korban pinjam online dari 25 provinsi di Indonesia yang mana pihak fintech sebagai pemberi pinjaman dianggap telah melanggar hukum dengan menyebarkan data pribadi mereka dan melakukan penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam atau kontak darurat yang disertakan namun ke seluruh nomor kontak yang tertera didalam kontak peminjam oleh peminjam. Tak hanya itu, di antara 1330 korban yang mengadu, ada yang merasa menerima ancaman, fitnah hingga pelecehan seksual. LBH Jakarta merinci 14 jenis aduan yang dialami oleh para korban. LBH juga mencatat 89 fintech yang dianggap melanggar peraturan. Dua puluh lima dari mereka bahkan merupakan fintech yang terdaftar di OJK.⁶

Munculnya kasus Rupiah Plus beberapa waktu yang lalu menyadarkan kita semua bahwa perlindungan konsumen peminjam, khususnya pada layanan *fintech* masih rawan akan penyalahgunaan dan isu privasi lainnya. Hal itu mengingat dalam hal ‘utang-piutang *online*’ ini data pribadi nasabah terintegrasi secara *online*.⁷ Di lain pihak, kehadiran P2P *lending* pada sektor hukum mengakibatkan berbagai persoalan hukum dalam perlindungan hak

⁵ Nindya Aldila, *YLKI terima Aduan Pelanggaran Fintech* 20, <https://finansial.bisnis.com>, diakses tgl 13 Agustus 2019

⁶ Tempo ABC, *Korban Pinjaman Online Di Indonesia*, <https://www.tempo.co>, diakses 13 Agustus 2019.

⁷ Ibid.

konsumen, baik sebagai debitur, Faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya persoalan hukum perihal P2P *lending* diantaranya tidak bertemunya antara debitur dan kreditur, kediaman para pihak yang saling berjauhan atau bahkan tidak saling mengetahui. Belum lagi sebagai program nasional keuangan inklusif yang kini tengah digalakkan oleh OJK dan Bank Indonesia, implementasi yang melibatkan masyarakat terkendala pada tingkat pemahaman pengguna yang tergolong ke dalam kelompok bottom of Pyramid.

Dindonesia lebih dari ratusan perusahaan Fintech sudah tersebar, dan dari Beberapa perusahaan fintech yang telah ada di Indonesia saat ini hanya beberapa saja yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan selain dari pada itu merupakan Fintech Ilegal.hal ini menunjukan lemahnya pengawasan terkait layanan pinjaman berbasis fintech.Sehubungan dengan hal tersebut, para otoritas keuangan perlu memperkuat perannya dalam mengawasi Fintech dengan memperhatikan faktor-faktor utama seperti aspek keamanan, perlindungan konsumen, pelayanan, inklusivitas, dan mitigasi risiko (terutama risiko teknologi informasi dan cyber crime).

Berdasarkan Direktori Fintech (*peer to Peer Landing*) per juni 2019 total data Perusahaan Fintech Landing Berizin dan Terdaftar di OJK hanya ada 113 perushaan fintech yang telah meperoleh izin dan Terdafatr diantaranya Danamas, Koinworks, Amartha, Investree, Modalku, ,Dana cepat, Akseleran,Uang Teman, Dompel Kilat, dll.⁸

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Fintech Landing Berizin dan Terdaftar Di Ojk, <https://www.ojk.go.id>, diakses tgl 16 Oktober 2019.

Dalam melakukan perlindungan konsumen terhadap sector jasa keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki tugas dan berkewajiban dalam melakukan edukasi dan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. Untuk layanan Fintech yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang telah mendapatkan izin dan diawasi oleh OJK maka PUJK tersebut wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen pada POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Terkait Fintech yang dilakukan oleh non-PUJK (atau dapat disebut sebagai Fintechstartup) maka Fintech tersebut wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen pada Peraturan OJK No. 77/POJK.07/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi khususnya untuk perlindungan pengguna layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yaitu pasal 29 yang menyatakan *“bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data. Dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau”*⁹

Dengan mempertimbangkan hukum sebagai kekuatan yang memberikan perlindungan terhadap kemungkinan pelanggaran hak dan sebagainya terhadap semua pihak yang beritikad buruk maka peneliti menarik untuk membahas

⁹ Peraturan OJK No. 77/POJK.07/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

dalam penelitian ini yang berjudul ”**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KONSUMEN SELAKU DEBITUR TERHADAP LAYANAN PINJAMAN BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGI (peer to peer Landing) DI INDONESIA**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang di atas ada beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan hukum atas hak konsumen selaku Debitur pengguna jasa Pinjaman berbasis Financial Technology (*peer to peer Landing*) Di Indonesia ?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Debitur pengguna layanan jasa Pinjaman berbasis Financial Technology (*peer to peer Landing*) apabila hak-haknya selaku Konsumen dilanggar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian hukum ini ialah:

1. Untuk mengetahui Perlindungan hukum atas hak konsumen selaku Debitur pengguna jasa Pinjaman berbasis Financial Technology (*peer to peer Landing*) Di Indonesia

2. Untuk Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Debitur pengguna layanan jasa Pinjaman berbasis Financial Teknologi (*peer to peer Landing*) apabila hak-haknya selaku Konsumen di langar

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini selain dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan baru untuk penulis terkait perlindungan hukum terkait perlindungan hukum atas Hak konsumen selaku Debitur Terhadap layanan jasa Pinjaman berbasis Financial Technology (*pee to pee Landing*) Di Indonesia Di samping itu, manfaat penelitian secara subyektif yaitu sebagai syarat untuk Penulisan Tugas Akhir.

2. Bagi Mahasiswa

Memberikan tambahan pengetahuan mengenai Perkebangan sektor jasa keuangan berbasis Financial Technology serta perlindungan hukum perlindungan hukum atas Hak konsumen selaku Debitur Terhadap layanan jasa Pinjaman berbasis Financial Teknologi (*peer to peer Landing*) Di Indonesia

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi yang utuh terkait perlindungan hukum atas Hak konsumen selaku Debitur Terhadap layanan jasa Pinjaman berbasis Financial Teknologi (*pee to pee Landing*) Di Indonesia

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terkait perlindungan hukum atas Hak konsumen selaku Debitur Terhadap layanan jasa Pinjaman berbasis Financial Teknologi (*peer to peer Lending*) Di Indonesia sehingga dengan Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi kalangan masyarakat sebagai pengguna Fintech.

F. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini akan dibuat dalam bentuk penelitian yang juga membutuhkan beberapa terapan ilmu demi memudahkan tercapainya penelitian yang ilmiah dan dapat menjadi sumber data dan sumber ilmu yang akurat. Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikebangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.¹⁰

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.¹¹ Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan

¹⁰ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum* (cetakan keempat), Jakarta, Sinar Grafika. Hlm.18

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm.112

tipe penelitian normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undang (*the statue approach*) dan pendekatan fakta (*the fact approach*). Pendekatann perundang-undangan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undang yang ada yang berhubungan dengan permasalahan didalam penulisan ini. Dan pendekatan fakta dengan mencari kenyataan-kenyataan atau fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

penelitian Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹²

Tahapan pertama untuk penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Untuk metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang berasal dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal-hal tersebut peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13-14.

tersebut merupakan dasar bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹³

2. Bahan Hukum

Dalam proses penyusunan penelitian ini penulis menggunakan 3 jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/20013 Tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 014/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/informasi Pribadi Konsumen, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19

¹³Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta. Penerbit Kencana, Hlm.177

¹⁴Ngobrolin Hukum, *Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif*, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com>, akses 19 Maret 2018.

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perundang-undangan lain yang terkait.

- b. Bahan Hukum Sekunder, biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.¹⁵
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model studi kepustakaan (*library research*). Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,¹⁷ yakni

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Jhony Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia. Hlm.392

penulisan yang didasari pada data-data yang dijadikan obyek penulisan kemudian dikaji dan disusun secara komprehensif.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, yakni cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan juga menganalisis data yang diperoleh dengan metode penelitian terhadap sistematika hukum yaitu Penelitian ini dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Penelitian ini sangat penting oleh karena masing-masing pengertian pokok/dasar mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum.

G. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penlitian	Peneliti	Permasalahan	Perbedaan
1	Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi oleh Fintech Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)	Titik Wijayanti, Jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta	Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan yaitu terkait pelaksanaan pemberian kredit fintech terhadap pelaku UKM, mengingat masih banyak kelemahan	Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Dalam penelitian ini membahas terkait pemberian kredit berbasis financial teknologi kepada pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah sedangkan penelitian

No	Judul Penelitian	Peneliti	Permasalahan	Perbedaan
			ditememukan dari pinjam meminjam yang dilakukan secara online termasuk jika ada pihak-pihak UKM atau Peminjam yang menyalahi aturan digital yang ditetapkan Fintech (<i>p2p Lending</i>)	yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini lebih berpusat pada pinjaman yang dilakukan secara Personal atau (debitur personal)
2	Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia”.	Alficha Rezita Sari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Keterbatasan tanggung jawab Investree, Crowdo, Akseleran sebagai Penyelenggara layanan <i>Fintech</i> berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> jika terjadi gagal bayar oleh Perima Pinjaman jelas bertentangan dengan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi bahwa Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi,	Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Dalam penelitian ini membahas terkait pemberian kredit berbasis financial teknologi kepada pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini lebih berpusat pada pinjaman yang dilakukan secara Personal atau (debitur personal)

No	Judul Penelitian	Peneliti	Permasalahan	Perbedaan
			dan/atau pegawai Penyelenggara. Bahwa Pemberi Pinjaman tidak akan menyalurkan dananya kepada Pemberi Pinjaman tanpa direkomendasikan oleh pihak Penyelenggara sehingga jelas tidak ada perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman.	
3	Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin	Iswi Hariyani, Fakultas Hukum Universitas Jember & Cita Yustisia Serfiyani, Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Terkait permasalahan dalam penelitian ini penulis memaparkan dalam 3 Rumusan msala yaitu a) peran OJK dalam pengembangan bisnis PM-Tekfin? b) bentuk perlindungan hukum bagi pengguna PM-Tekfin c) bentuk penyelesaian sengketa bisnis PM-Tekfin	Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran OJK dalam pengembangan bisnis jasa PM-Tekfin di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pengguna PM-Tekfin serta bentuk penyelesaian sengketa perdata antara pengguna dan pelaku usaha PM-Tekfin. Pengguna PM-Tekfin terdiri dari dua macam yaitu investor (Pemberi Pinjaman) dan debitor (Penerima Pinjaman) Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

No	Judul Penelitian	Peneliti	Permasalahan	Perbedaan
				peneliti dalam penelitian skripsi ini membahas terkait Perlindungan Hukum Atas Hak Konsumen Selaku Debitur Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Financial Teknologi (<i>Peer To Peer Lending</i>)
4	Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Teknologi (POJK No 77/POJK.01/2016)	Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro	Terkait permasalahan dalam penelitian ini penulis memaparkan dalam 2 Rumusan masalah yaitu: a) Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam <i>financial technology</i> berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016? b) Bagaimana mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap <i>financial Technology</i> berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan pelaksanaan pengawasan saat ini?	Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 . Dalam penelitian ini membahas terkait Pengawasan yang dilakukan oleh OJK berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 serta mengenai Hubungan hukum para pihak dalam financial Teknologi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam Penelitian skripsi ini lebih kepada perlindungan Hukum atas Hak Konsumen Selaku Debitur Terhadap layanan Pinjamam Berbasis Fianncial Teknologi (<i>P2P Lending</i>) di Indonesia.
5	Tinjauan Hukum Perlindungan	Nuzul Rahmayani, Fakultas Hukum	Terkait permasalahan	Penelitian ini dilakukan pada tahun

No	Judul Penelitian	Peneliti	Permasalahan	Perbedaan
	Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis <i>Financial Technology</i> di Indonesia	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	dalam penelitian ini penulis memaparkan dalam 2 Rumusan msalah yaitu: (1) Bagaimanakah regulasi dan pengawasan perusahaan berbasis <i>financial technology</i> di Indonesia?; (2) Bagaimanakah tinjauan hukum perlindungan konsumen terkait pengawasan perusahaan berbasis <i>financial technology</i> di Indonesia?	2018 . Dalam penelitian ini lebih menekankan kepada aspek pengawasan yaitu Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis <i>Financial Technology</i> di Indonesia sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam Penelitian skripsi ini lebih kepada perlindungan Hukum atas Hak Konsumen Selaku Debitur Terhadap layanan Pinjamam Berbasis Fianncial Tecnologi (<i>P2P Landing</i>) di Indonesia.

Penjelasan Tabel Penelitian Terdahulu

1. Titik Wijayanti (2018)

Pada penelitian yang ini dilakukan pada tahun 2018. Penelitian ini merupakan peneltian berupa skripsi dengan judul : “**Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi oleh Fintech Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)**”

Adapun hasil dari pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bahwa Pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh fintech kepada pelaku UKM.Terdapat banyak perusahaan yang sudah terdaftar dan berizin di OJK per 25 Januari 2018 terdapat 34 perusahaan.

Meskipun terdapat kurang lebih 40 fintech yang beroperasi di Indonesia, namun belum ada fintech yang terdaftar di Surakarta. Dimana pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dari fintech kepada pihak UKM atau pelaku usaha atau masyarakat yang butuh dana cepat dilakukan secara online berdasarkan sistem peer to peer lending. Pengaturan mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut ada pada mitigasi resiko masing-masing fintech mengingat masih banyak kelemahan dari pinjam meminjam yang dilakukan secara online tersebut, termasuk nanti di kemudian hari jika ada pihak baik dari pihak UKM atau peminjam yang menyalahi aturan-aturan digital yang telah ditetapkan fintech sebelumnya dan telah disepakati.

- b. Permasalahan yang muncul dalam pemberian kredit fintech terhadap pelaku UKM. Berdasarkan masing-masing hubungan baik di antara penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman telah diatur sedemikian rupa mengenai mitigasi resiko, sehingga dalam masing-masing hubungan telah ada ketentuan atau perjanjian yang mengingat termasuk mengenai ketentuan dana yang dibutuhkan, tujuan peminjaman dana tersebut, besarnya bunga pinjaman dan jangka waktu pengembalian pinjaman semua harus disepakati secara jelas, termasuk pula dengan agunan atau jaminan yang diberikan oleh peminjam dana. Dalam menyikapi kelemahan-kelemahan yang terjadi di kemudian hari termasuk jika terjadinya gagal bayar, atau kesulitan dalam penagihan pembayaran, termasuk adanya kesalahan informasi atau kesalahan transaksi yang dilakukan, dan juga adanya jaringan error dalam fintech adalah merupakan bagian dari mitigasi resiko yang senantiasa harus dibangun dan diperkuat oleh fintech itu

sendiri. Sehingga kelemahan-kelemahan tersebut dapat diawasi dan terus diperbaiki dalam penyelenggaraan pinjaman yang lebih baik.

2. Alficha Rezita Sari (2018)

Pada penelitian yang ini dilakukan pada tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian berupa skripsi dengan judul: “**Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia**”.

Adapun hasil dari pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

Bahwa mekanisme penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*, hubungan hukum terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara layanan *Fintech* dan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara layanan *Fintech* adalah perjanjian pemberian kuasa sebagaimana Pasal 1792 KUHPerdata. Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2PL* diberi kuasa oleh Pemberi Pinjaman bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman dalam menyalurkan dana Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman. Dari kuasa tersebut Penyelenggara dapat mengelola dana Pemberi Pinjaman kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang dianggap cukup berkualitas dari hasil analisis dan seleksi Penyelenggara. Sedangkan hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman adalah perjanjian pinjam meminjam (utang piutang) sebagaimana Pasal 1754 KUHPerdata. Kedudukan Pemberi Pinjaman sebagai kreditur dan Penerima Pinjaman adalah debitur.

Berdasarkan hubungan hukum tersebut, perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* hanya terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Penyelenggara bukan sebagai pihak pada hubungan hukum tersebut. Tidak pernah ada perjanjian antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman hanya ada dokumen untuk memenuhi kelengkapan syarat dari Penyelenggara. Apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak Penyelenggara karena pada dasarnya Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut. Pada faktanya Pemberi Pinjaman hanya dapat menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman yang dianggap berkualitas dan layak untuk diberi pinjaman berdasarkan hasil analisis dan seleksi dari Penyelenggara. Berdasarkan hal tersebut jelas Pemberi Pinjaman sangat rentan dirugikan apabila terjadi gagal bayar dari Penerima Pinjaman. Oleh sebab itu jelas belum ada perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar pada mekanisme *Fintech* berbasis *P2PL*.

3. Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani (2017)

Pada penelitian yang ini dilakukan pada tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian berupa Jurnal Legalisasi Indonesia Vol. 14 No. 03 dengan judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia”**

Adapun hasil Penelitian dalam Jurnal ini yaitu :

- a. Bahwa OJK berperan dalam pengembangan bisnis PM-Tekfin karena OJK adalah lembaga negara independen yang berwenang mengatur dan

mengawasi lembaga jasa keuangan. OJK mendorong perkembangan bisnis PM-Tekfin guna merespon kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan bisnis daring. Perkembangan bisnis PM-Tekfin diharapkan dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam industri jasa keuangan serta memperbesar porsi pembiayaan bagi debitur UMKM. OJK telah menerbitkan Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai payung hukum bagi pengembangan bisnis PM-Tekfin di Indonesia.

- b. Perlindungan hukum bagi pengguna dan penyelenggara PM-Tekfin diatur dalam UU Otoritas Jasa Keuangan, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, KUH Perdata, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan OJK nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam- Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan peraturan terkait lainnya.
- c. Penyelesaian sengketa bisnis PM-Tekfin dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi (di luar pengadilan) dapat ditempuh menggunakan APS dengan cara Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi dan Arbitrase

4. Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono (2017)

Pada penelitian yang ini dilakukan pada tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian berupa Jurnal Diponogoro Jurnal Law Volume 6, Nomor 3, dengan

judul:“**Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Teknologi (POJK No 77/POJK.01/2016)**”

Adapun hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Bahwa pelaksanaan pengawasan OJK terhadap *fintech* saat ini belum dapat berjalan optimal karena pengawasan baru dilaksanakan pada tahap pra-operasional usaha dikarenakan adanya hambatan regulasi dan infrastruktur pengawasan.
- b. Bahwa Hubungan hukum para pihak dalam *fintech* berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi timbul karena adanya suatu perjanjian. Terdapat tiga macam perjanjian yang timbul dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi atau pinjam meminjam uang *online*, yaitu perjanjian penggunaan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi, perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi dan perjanjian pemberian pinjaman (pinjam meminjam uang)

5. Nuzul Rahmayani (2018)

Pada penelitian yang ini dilakukan pada tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian berupa Jurnal penelitian yaitu dalam Pagaruyuang Law Jurnal Volume 2 No 1, dengan judul:“ **Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Teknologi di Indonesia**”

Adapun hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Bahwa di Indonesia terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang mengatur industri *fintech* yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia hingga saat ini setidaknya telah membuat sejumlah regulasi terkait *fintech* ini, yaitu: (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; (3) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial; (4) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial. Sedangkan OJK, hingga saat ini baru menerbitkan 1 (satu) buah regulasi pengawasan perusahaan *fintech*, yaitu terkait pengawasan salah satu produk *fintech* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sementara, otoritas yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang berbasis *fintech* adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan .
- b. Bahwa sistem pengawasan perusahaan berbasis *fintech* sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan *fintech* itu sendiri. Faktanya, hingga saat tulisan ini dibuat regulasi yang mengatur perusahaan berbasis *fintech* ini masih sangat sedikit.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapaun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini Penulis membagi pendahuluan dalam beberapa sub bab diantaranya terdiri dari latar belakang sebagai penjelasan dan pengantar dalam permasalahan yang diangkat oleh Penulis. Rumusan masalah dibagi menjadi tiga permasalahan yang akan menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini yakni antara lain: 1) Bagaimana Perlindungan hukum atas hak konsumen selaku Debitur pengguna jasa Pinjaman berbasis Financial Technology (*peer to peer Lending*) Di Indonesia? 2) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Debitur pengguna layanan jasa Pinjaman berbasis Financial Technology (*peer to peer Lending*) apabila hak-haknya selaku Konsumen dilanggar? Tujuan penulisan, merupakan penyampaian tujuan yang akan dilakukan oleh Penulis dalam membuat penulisan hukum ini. Manfaat

penulisan terdiri dari aspek teoritis dan aspek praktis yang menjadi suatu penjelasan mengenai siapa saja dan apa saja yang akan mendapatkan manfaat dari penulisan ini, serta kegunaan penulisan bagi Penulis, mahasiswa hukum secara khusus atau mahasiswa secara umum, masyarakat, serta kalangan praktisi hukum dan akademisi. Metode Penulisan yang digunakan oleh Penulis ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi uraian teori yang digunakan untuk melandasi penulisan hukum/skripsi. Penggunaan beberapa terminologi yang akan digunakan Penulis guna memfokuskan permasalahan yang akan dibahas. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengaturan terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini adalah inti dari penulisan hukum yang dibuat oleh Penulis. Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis sesuai dengan sumber yang didapatkan oleh Penulis yaitu antara lain: 1) Bagaimana Perlindungan hukum atas hak konsumen selaku Debitur pengguna jasa Pinjaman berbasis Financial Technology (*peer to peer Lending*) Di Indonesia; 2) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Debitur pengguna layanan jasa Pinjaman berbasis

Financial Technology (*peer to peer Lending*) apabila hak-haknya selaku Konsumen dilarang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian serta berisikan saran dan rekomendasi penulis sehingga diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

